

---

## Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM): Konsep dan Implementasi

Tri Jamhari<sup>1\*</sup>, Nurul Khotimah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Magister Administrasi Publik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

<sup>2</sup>UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

\*Email Korespondensi: [ijam.gendug@gmail.com](mailto:ijam.gendug@gmail.com)

---

### Abstrak

Kemajuan ekonomi suatu negara, pada umumnya didukung oleh jumlah wirausaha yang makin banyak. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka dan setengah penganggur, meningkatkan produktivitas tenaga kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan beberapa program pengembangan kewirausahaan, salah satunya adalah program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; mengetahui mekanisme pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; menemukan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan, serta merumuskan alternatif pemecahannya. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan atau pelaksanaan program TKM pada umumnya dan khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi evaluasi, hanya dibatasi dengan mengevaluasi input dan sebagian proses pelaksanaan program dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Program TKM untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi angka pengangguran, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, fokus utama dari program TKM adalah pendampingan kelompok yang dilakukan oleh tenaga pendamping sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

**Kata Kunci:** Bonus Demografi, Kapasitas SDM, Evaluasi, Program TKM, Kewirausahaan

---

DOI: [10.47198/naker.v17i3.133](https://doi.org/10.47198/naker.v17i3.133)

Dikirim: 13-07-2022

Dipublikasikan: 01-12-2022

---

### 1. Pendahuluan

Bonus demografi pada usia produktif dapat dilihat dari struktur demografi Indonesia dewasa ini, maka pada tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang untuk mengalami bonus demografi hingga 180 juta orang berusia masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Namun, pandemi covid-19 ini justru memperparah kondisi ketenagakerjaan yang sudah hadir sejak lama. Sebelum pandemi, kualitas tenaga kerja Indonesia dapat dibilang lemah karena dari jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang, hanya sebanyak 131,03 juta jumlah

penduduk yang bekerja. Struktur angkatan kerja tersebut masih didominasi oleh masyarakat berpendidikan rendah (SD ke bawah) yang menyebabkan *value*/nilai mereka di mata industri pun lemah.

Selain itu, jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2020—meskipun menurun dari periode sebelumnya yaitu mencapai 6,88 juta orang—namun lulusan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) justru menyumbang angka pengangguran terbesar yakni 8,49 persen, disusul lulusan SMA sebesar 6,77 persen, diploma 6,76 persen, universitas/ perguruan tinggi sebesar 5,73 persen, SMP sebesar 5,02 persen, dan SD 2,98 persen. Kemudian, ketika Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi dan *physical distancing* menjadi upaya pencegahan penularannya, dunia usaha mengalami guncangan berat yang mengakibatkan sebanyak 2.146.667 pekerja terdampak Covid-19 dengan rincian: 383.645 pekerja di-PHK; 1.132.117 pekerja dirumahkan; dan 630.905 pekerja informal kehilangan pekerjaan/bangkrut. Sementara itu, hingga 22 April 2020, 34.179 calon pekerja migran Indonesia gagal berangkat dan 465 peserta pemagangan dipulangkan. Data ini bersumber dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pemerintah dalam menyikapi hal ini, berupaya agar kondisi ekonomi rakyat tidak terpuruk dengan memberikan kebijakan tahun 2020 berupa Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang menjadi salah satu program unggulan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperluas kesempatan kerja bagi tenaga formal dan informal. Program ini menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan bidang ketenagakerjaan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki agenda penguatan faktor utama pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing tenaga kerja, program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) menawarkan pelatihan dan bantuan sarana usaha melalui Program Pembentukan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP). Dalam program ini Kementerian Ketenagakerjaan menawarkan program pelatihan dan bantuan sarana usaha yang ditujukan bagi tenaga kerja sukarela (TKS) purna dan kelompok binaannya melalui subsidi program dan program penguatan usaha kelompok dampingan.

Demi menyongsong bonus demografi dan pemulihan ekonomi ke depan, pemerintah perlu juga melakukan pemetaan di beberapa aspek ketenagakerjaan untuk memberikan gambaran atas kondisi ketenagakerjaan yang baru pasca pandemi Covid-19. Pemetaan tersebut antara lain: pemetaan industri dan tenaga kerja yang terdampak Covid-19; pemetaan jenis pekerjaan yang hilang dan baru muncul akibat dinamika yang terjadi selama pandemi; pemetaan peluang digitalisasi usaha untuk perluasan kesempatan kerja; dan pemetaan sektor industri prioritas pasca Covid-19. Selain pemetaan untuk perencanaan ketenagakerjaan ke depan, dengan adanya peluang digitalisasi di dalam pelatihan vokasi mampu menghasilkan tenaga kerja yang berpengetahuan dan terampil dalam waktu singkat dan masif jika dimanfaatkan dengan baik dan benar. Koordinasi antar kementerian lembaga menjadi penting dalam memastikan bahwa tenaga kerja yang hadir saat ini merupakan tenaga kerja yang berkualitas terampil dan kompeten.

Adam (2016) menegaskan, daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih relatif rendah. Salah satu penyebab utamanya adalah tingkat pendidikan tenaga kerja yang masih rendah. Hal tersebut membuat tenaga kerja Indonesia masih berpenghasilan rendah dan tak mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang selama ini dianggap sebagai kompetitor, seperti Malaysia dan Thailand. Dengan demikian, meskipun secara kuantitas Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar, tetapi rendahnya kualitas membuat angkatan kerja yang berhasil memasuki pasar kerja belum benar-benar berperan secara optimal dalam mendukung peningkatan daya saing perekonomian.

Kualitas tenaga kerja juga dapat diindikasikan dengan jumlah wirausaha di suatu negara yang mampu melakukan inovasi secara terus menerus untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar, baik pasar setempat, regional, nasional, maupun internasional. Pada umumnya, makin maju suatu negara maka semakin banyak jumlah wirausahanya karena negara memiliki daya tahan benturan yang kuat terhadap krisis ekonomi (Margahana dan Triyanto, 2019: 303). Secara Umum, jumlah wirausaha di Indonesia hanya 1,65% dari jumlah penduduk, sementara Singapura, Malaysia, dan Thailand masing-masing berjumlah 7%, 5% dan 3%. Bahkan, di Amerika Serikat wirausahanya berjumlah 10% dari jumlah penduduknya (Rizal & Samsul, 2015).

Dalam Perencanaan Jangka Menengah, pemerintah Indonesia menargetkan jumlah wirausahanya menjadi 2% dari jumlah penduduk. Guna mendukung pengembangan kewirausahaan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan cq. Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mengembangkan kebijakan program perluasan kesempatan kerja dengan kelompok sasaran para penganggur dan setengah penganggur. Program ini bertujuan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus membangun kegiatan produktif, khususnya di wilayah pedesaan. Program ini ditujukan melalui pembangunan peran serta masyarakat yang dapat memacu perekonomian pedesaan dan menciptakan pekerjaan bagi masyarakatnya serta untuk meningkatkan produktivitas kerja masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mengembangkan etos kerja dan jiwa kewirausahaan masyarakat. Selain lewat individu, potensi desa juga dapat terbangun melalui kelompok-kelompok ekonomi kreatif di desa dalam mengembangkan peluang-peluang baru.

Salah satu kegiatan teknis yang dikembangkan melalui fasilitasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja adalah program TKM. Keberhasilan program, adalah seberapa banyak masyarakat mampu mengembangkan kegiatan produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya setempat. Berdasarkan hal di atas, perlu dilakukan studi untuk mengetahui bagaimana implementasi program TKM dan faktor-faktor apa yang perlu dievaluasi dari pengimplementasian tersebut. Dalam pelaksanaan program tersebut, diindikasikan akan muncul permasalahan yang antara lain sasaran daerah atau lokasi dan orang yang dibina kurang tepat.

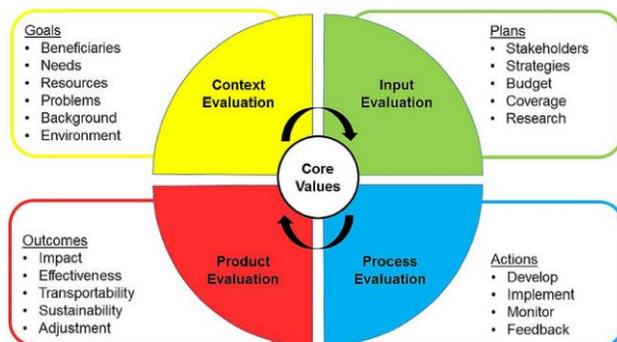
Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; mengetahui mekanisme pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan; menemukan dan mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan program TKM di Kementerian Ketenagakerjaan, serta merumuskan alternatif pemecahannya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan atau pelaksanaan program TKM pada umumnya dan khususnya di Kementerian Ketenagakerjaan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, sistem pemikiran, atau status kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan secara holistik hasil evaluasi program TKM yang dilaksanakan Kementerian Ketenagakerjaan sehingga diperoleh gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai proses pelaksanaan program dimulai dari intervensi dan identifikasi Program TKM, mekanisme pelaksanaan program TKM, permasalahan dalam pelaksanaan program TKM, dan alternatif pemecahan program TKM.

Desain penelitian untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi menggunakan desain penelitian studi evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terhadap program TKM oleh Kementerian Ketenagakerjaan, dengan model evaluasi berupa *context, input, process* dan *product* (CIPP) program tersebut setelah waktu satu tahun sejak pelaksanaannya. Model evaluasi CIPP merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh evaluator. Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam (1967). CIPP merupakan singkatan dari: (1) *Contexts evaluation*, evaluasi ini dilakukan untuk melihat kembali apa-apa yang menjadi dasar atau ide dari munculnya sebuah program dan evaluasi ini juga melihat apakah program ini sudah sesuai dengan tujuannya dalam memenuhi sebuah kebutuhan; (2) *Input evaluation*, evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah perancangan program sudah memperhatikan sumber daya yang tersedia; (3) *Process evaluation*, evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan program sudah sesuai dengan rencana; (4) *Product evaluation*, evaluasi ini dilakukan untuk mengukur apakah tujuan program telah tercapai dengan baik.

**Gambar 1:** Context, Input, Process, Product (CIPP) Model



Sumber: Daniel L Stufflebeam, "International Handbook of Educational Evaluation"

Penelitian dibatasi dengan evaluasi input dan proses yang meliputi tahap strategi perencanaan hingga sebagian proses pelaksanaan program. Pembatasan ini dilakukan dikarenakan keterbatasan sumber daya yang ada. Analisis input dan proses berdasarkan pendapat para ahli, ketentuan yang berlaku, atau data sekunder yang diperbandingkan dengan perencanaan program kewirausahaan yang ada di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk memperkaya analisis dilakukan kegiatan wawancara dengan para pelaksana dan peserta program TKM.

Data yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, melainkan fakta empiris. Data yang didapat akan direduksi, untuk kemudian masuk ke tahapan penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Bonus Demografi

Peningkatan penduduk usia kerja merupakan modal besar pertumbuhan ekonomi yang akan menjadi potensi pembangunan ketenagakerjaan. Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan-Kemnaker (2019) dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 (BPS, 2019), dalam struktur umur penduduk dari tahun 1961 hingga tahun 2015 dan proyeksinya hingga tahun 2045, memperlihatkan adanya penambahan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebagai dampak meningkatnya angka harapan hidup. Pada tahun 2015 terdapat 171,0 juta penduduk usia kerja, dan akan terus bertambah pada tahun-tahun selanjutnya dan diperkirakan mencapai 207,9 juta penduduk usia kerja usia 15-64 di tahun 2045.

**Gambar 2:** Struktur Umum Penduduk dari Tahun 1961 dan Proyeksi hingga 2045 (Permenaker Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024: 15)



Penduduk usia kerja kelompok usia muda (15-29 tahun) jumlahnya meningkat pesat dari 24,1 juta pemuda di tahun 1961 menjadi 50,7 juta pada tahun 1990, 62,1 juta di tahun 2010, 63,2 juta tahun 2015 dan akan terus bertambah menjadi 64,9 juta pemuda di tahun 2045. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada masyarakat usia muda dikarenakan umumnya mereka adalah pencari kerja baru (*new entry*) di pasar kerja, baik yang lulusan sekolah menengah ataupun lulusan perguruan tinggi. Peran pemerintah bisa mendorong investasi agar menciptakan pekerjaan bagi calon pekerja sangat diharapkan, dengan hadirnya investasi akan membuat semakin banyak pilihan bagi pencari kerja.

Banyaknya pertumbuhan penduduk pada usia kerja membuat struktur kependudukan Indonesia dari sisi usia pun mengalami pergeseran. Di sinilah kemudian muncul istilah Bonus Demografi, yaitu suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi, yakni menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. Penurunan angka kelahiran dapat menyebabkan penurunan jumlah penduduk umur 0-14 tahun, diikuti dengan penambahan penduduk usia produktif 15-64 tahun sebagai akibat banyaknya kelahiran di masa lalu. Sementara karena perbaikan status kesehatan, umur harapan hidup semakin panjang, sehingga penduduk usia 65 tahun ke atas (lansia) akan meningkat. Bonus demografi dapat memberikan peluang bagi Indonesia agar mendapat tenaga kerja produktif yang melimpah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan sumber daya manusia yang melimpah dan produktif.

Adioetomo (2010) menjelaskan bahwa bonus demografi hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk suatu negara yaitu yang disebut sebagai *window of opportunity* (jendela kesempatan). Lebih lanjut dikatakan bahwa kesempatan yang diberikan oleh bonus demografi ini berupa tersedianya kondisi atau ukuran ideal pada perbandingan jumlah penduduk yang produktif dengan penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi memberikan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi suatu negara, tetapi bonus demografi tidak otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena ada prasyarat yang harus dipenuhi. Bloom, Canning, dan Rosenberg (2011) memaparkan ada lima faktor yang menjadi perhatian pemerintah agar bonus demografi dapat diraih, yaitu:

- a. Kualitas lembaga pemerintah: lembaga yang bebas korupsi, menghormati hak kekayaan intelektual, menghormati kontrak dan penegakan hukum,
- b. Kebijakan ketenagakerjaan: menciptakan lingkungan sehingga tenaga kerja dapat bekerja secara produktif,
- c. Manajemen ekonomi makro: mengendalikan inflasi, upah yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada tabungan, tingginya rasio utang terhadap PDB sehingga pemerintah kesulitan dalam pembayaran bunga,
- d. Kebijakan perdagangan: menciptakan kesempatan kerja melalui industri yang berorientasi ekspor,
- e. Kebijakan pendidikan: meningkatkan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan dapat dipekerjakan pada berbagai sektor.

### 3.2. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) di Kementerian Tenaga Kerja sebagai Program Kewirausahaan

Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri merupakan salah satu program perluasan dan pengembangan kesempatan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Program ini merupakan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru dengan memobilisasi seluruh potensi sumber daya yang ada.

Tujuan dari kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja terdidik yang menganggur;
- b. Tercipta dan meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi tenaga kerja terdidik;
- c. Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta wawasan berusaha; dan
- d. Membina dan mengembangkan kader Wirausaha Baru atau pengusaha pemula yang mandiri dan produktif dengan mengoptimalkan potensi sumber-daya yang tersedia.

Sasaran peserta Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri adalah tenaga kerja penganggur (penganggur terbuka dan setengah penganggur) yang berminat berwirausaha dengan pendidikan minimal SMA. Sasaran Lokasi Pemberdayaan Masyarakat melalui Tenaga Kerja Mandiri adalah daerah dengan tingkat penganggur lebih tinggi dari tingkat penganggur nasional atau daerah kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau daerah dengan keluarga miskin terbanyak di kabupaten/kota.

Pelaksanaan pusat kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pengembangan kewirausahaan adalah Kementerian Ketenagakerjaan cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Sedangkan pelaksana daerah adalah dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten dan atau Kota. Direktorat Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja bertugas membuat kebijakan yang terkait dengan kegiatan, menetapkan lokasi kegiatan, menyusun petunjuk pelaksanaan pemberdayaan, melakukan koordinasi dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten/kota dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pelaksana daerah terdiri dari Penanggungjawab Daerah, Ketua Pelaksana dan Pelaksana Teknis. Tugas pelaksana daerah adalah melaksanakan sosialisasi kegiatan, melaksanakan rekrutmen dan seleksi peserta, melaksanakan pembekalan kewirausahaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan program pemberdayaan TKM Kementerian sebagai program kewirausahaan di Kementerian Tenaga Kerja, sebagai berikut.

### 1. Identifikasi Potensi

Program ini diawali dengan penentuan lokasi sasaran. Untuk memilih lokasi perlu dilakukan identifikasi terhadap semua potensi yang ada di daerah agar dapat menentukan desa/kelurahan yang diduga kuat dalam memberikan respons positif terhadap program. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan lokasi kegiatan adalah potensi Sumber Daya Alam, Potensi Sumber Daya Manusia, tingkat afinitas masyarakat serta keberadaan pendamping.

### 2. Sosialisasi Program

Sosialisasi dilaksanakan di desa/kelurahan yang telah ditentukan bersama antara lembaga pendamping dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. Tujuan sosialisasi adalah agar masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran bersama untuk mendukung dan ikut berpartisipasi baik dalam penggalian informasi, perencanaan, pelaksanaan, maupun memelihara keberlanjutan kegiatan pada masa setelah pendampingan. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan di kantor kelurahan, ruang sekolah, lapangan dan lain-lain, dilaksanakan oleh institusi pendamping yang telah ditunjuk.

### 3. Rekrutmen dan Seleksi Calon Sasaran

Rekrutmen dan seleksi calon peserta program tenaga kerja mandiri dalam rangka menumbuhkan wirausaha dilaksanakan oleh lembaga pendamping berkoordinasi dengan aparat desa/kelurahan. Seleksi dilakukan dengan seleksi tertulis dan wawancara untuk menggali minat, potensi diri (berkaitan dengan sikap kewirausahaan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki), gagasan awal jenis usaha yang diinginkan serta kendala yang dihadapi.

### 4. Melakukan Evaluasi dan Menetapkan Hasil Seleksi

Pelaksanaan seleksi harus dipersiapkan sebaik-baiknya terutama yang berkaitan dengan penyiapan instrumen berupa kuesioner dan pedoman interview, karena hasilnya sangat berguna untuk mengetahui kebutuhan pendampingan yang diperlukan.

### 5. Pembentukan Kelompok

Pembentukan kelompok tenaga kerja mandiri dilakukan sebagai wadah/wahana bersatunya para calon anggota sasaran yang merupakan langkah awal dari kegiatan penumbuhan dan pembinaan wirausaha. Kelompok diharapkan dapat berperan dan berfungsi sebagai sarana pendorong dalam proses perubahan sosial, wadah pembahasan dan penyelesaian masalah, wadah untuk menyalurkan aspirasi, wadah untuk menggalang tumbuhnya saling kepercayaan dan wahana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

### 6. Pembekalan Kelompok Sasaran

Kelompok yang telah dibentuk akan dibekali pengetahuan dan keterampilan sesuai kebutuhannya. Pembekalan dilaksanakan di masing-masing lokasi sesuai

dengan hasil analisis kebutuhan pembekalan, dengan maksimal jumlah sebanyak 80 jam pelajaran (jampel) setiap pembekalan.

#### 7. Pendampingan

Setelah dilatih, kelompok perlu didampingi dalam merintis usahanya, dengan prinsip wirausaha. Pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan teknis (*technical buildings*) maupun penguatan kemampuan kelembagaan (*capacity building*). Kegiatan pendampingan dilakukan dalam bentuk diskusi/pertemuan berkala, kunjungan lapangan, membangun jaringan (*networking*) dan merintis kemitraan usaha.

#### 8. Bantuan sarana usaha

Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan wirausaha baru, Pemerintah memberikan bantuan sarana usaha/modal usaha. Sarana usaha diberikan dalam bentuk peralatan yang dibutuhkan, sedangkan modal usaha diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk modal kerja. Sarana/modal usaha diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis usaha dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Mekanisme pemberian bantuan modal usaha dilakukan secara transparan yang dihadiri seluruh anggota calon penerima yang disaksikan oleh tenaga pendamping (fasilitator). Pemberian bantuan dapat dilakukan melalui kegiatan: (a) penyuluhan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan tentang tata cara ketentuan penggunaan bantuan modal; (b) pengajuan rencana penggunaan bantuan modal oleh kelompok; dan penyerahan bantuan modal usaha disertai dengan penandatanganan kuitansi tanda terima oleh masing-masing peserta.

#### 9. Monitoring evaluasi

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan program merupakan rangkaian kegiatan pemantauan, pengkajian/analisis, pengendalian dan pelaporan yang diperlukan dalam rangka:

- a. Untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan komponen program;
- b. Upaya penanggulangan masalah yang dihadapi untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dalam pencapaian sasaran kegiatan pada akhir penyelenggaraan kegiatan; dan
- d. Untuk mengetahui performa pelaksanaan kegiatan program secara keseluruhan.

#### 10. Pelaporan

Untuk keperluan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan diperlukan laporan kegiatan secara berkala oleh pendamping disampaikan kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat sebagai pelaksana program dan ditembuskan kepada Kemnaker cq. Direktur Pengembangan dan Perluasan

Kesempatan Kerja Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja. Jenis laporan pelaksanaan kegiatan adalah Laporan Triwulanan (3 Bulan), Laporan Semester (6 Bulanan), Laporan Akhir tahun dan Laporan Paripurna. (Pedoman Umum Penciptaan Wirausaha baru Melalui Tenaga Kerja Mandiri Tahun 2015)

### 3.3. Evaluasi Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Pada tahap pengimplementasian program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), ada beberapa hal yang peneliti rasa perlu untuk dievaluasi, khususnya evaluasi tahap input dan proses. Dimulai dari tahap identifikasi potensi, pembekalan dan pendampingan, bantuan sarana usaha, hingga pendampingan akhir dan monitoring. Sebab, ada beberapa hal yang kurang tepat sasaran atau pun perlu untuk ditingkatkan. Evaluasi ini diperlukan agar tujuan program kewirausahaan seperti TKM dapat tercapai, yakni memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja terutama di daerah miskin.

#### 3.3.1. Evaluasi Input

##### a. Tahap Identifikasi Potensi: Penentuan Lokasi TKM

Dalam tahap identifikasi potensi, langkah awal yang dilakukan dalam program TKM adalah dengan penentuan lokasi sasaran. Banyak faktor yang dijadikan patokan untuk pemilihan lokasi TKM, namun daerah yang diprioritaskan meliputi daerah (1) tingkat pengangguran terbuka yang tinggi, (2) jumlah persentase setengah pengangguran tinggi, dan (3) daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pertimbangan lainnya adalah daerah asal/kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Bekerja di Luar Negeri.

Dalam kenyataannya, antara satu kriteria dengan lainnya tidak sejalan bahkan sering bertentangan. Sebagai contoh: daerah kabupaten/kota dengan TPT tinggi ternyata tingkat kemiskinannya rendah, sehingga dalam penentuan prioritas daerah yang akan mendapatkan program menghadapi kesulitan. Untuk itu perlu adanya formula atau rumusan/perhitungan tertentu sehingga penentuan prioritas daerah yang akan mendapatkan program lebih tepat, sehingga tujuan program kewirausahaan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan cara mempertimbangkan kriteria TPT, jumlah proporsi setengah penganggur (%), dan jumlah pendidik miskin di daerah bersangkutan (%), masing-masing diberi penilaian dengan mengacu pada nilai TPT, jumlah setengah penganggur, maupun tingkat kemiskinan di tingkat nasional.

Setelah daerah prioritas ditentukan, juga perlu dipertimbangkan secara makro daerah dapat dirumuskan alternatif bidang usaha yang akan dikembangkan. Alternatif prioritas usaha, antara lain dapat dikembangkan dengan berdasarkan data potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota tersebut, komposisi/struktur mata pencaharian atau sektor yang berkembang,

potensi sumber daya manusia dan potensi pasar, dan infrastruktur yang ada serta data/informasi potensi atau faktor penghambat lainnya.

Sedangkan, untuk penentuan kecamatan atau desa yang menjadi prioritas didasarkan atas data permasalahan pengangguran dan kemiskinan atau kantong PMI serta potensi yang dapat dikembangkan melalui wirausaha guna memecahkan permasalahan tersebut di kecamatan atau desa bersangkutan. Data ini dapat diperoleh dari data podes dan kecamatan dalam angka, serta hasil observasi dari petugas/pejabat dinas kabupaten/kota.

Selain itu, yang lebih penting adalah adanya keterpaduan program kewirausahaan antar instansi setempat yang dikoordinasikan oleh Bappeda setempat. Keterpaduan tersebut termasuk juga pendanaannya. Dalam keterpaduan tersebut peran masing-masing instansi lintas sektor menjadi jelas melakukan apa di mana, kapan, dan bagaimana termasuk apa target dari masing-masing program tiap instansi lintas sektor di daerah bersangkutan. Setiap dinas yang mengusulkan program kewirausahaan di daerahnya harus menyampaikan proposal yang dilampiri dengan data-data tersebut (termasuk adanya keterpaduan program). Untuk kepentingan pemerintah pusat data kabupaten/kota tersebut minimal dapat digunakan sebagai kontrol terhadap penentuan program. Namun yang paling menentukan adalah adanya usulan dari dinas daerah yang membutuhkan program kewirausahaan di daerahnya.

Setelah ditentukan prioritas daerah yang akan dikembangkan kewirausahaannya, langkah ke dua adalah menentukan prioritas usaha yang potensial untuk dapat dikembangkan di daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan sumber daya alam atau bahan baku yang tersedia, perkembangan ekonomi setempat, potensi sumber daya manusia, infrastruktur, dan proyeksi pasar setempat atau pasar regional bahkan bila memungkinkan pasar ekspor. Prioritas usaha tersebut dapat dilanjutkan dengan mengacu pada rencana pembangunan ekonomi pemda setempat. Sebetulnya seorang wirausaha yang handal dapat melakukan identifikasi dan menentukan usaha yang akan dikembangkan dengan melihat peluang dan potensi setempat, namun demikian bila usaha yang dikembangkan sejalan dengan rencana pembangunan daerah setempat, diharapkan selain sesuai dengan potensi setempat juga dalam pelaksanaannya akan mendapat dukungan oleh Pemda setempat.

b. Evaluasi Rekrutmen dan Seleksi Calon Sasaran TKM

Program TKM sebagai program kewirausahaan dimaksudkan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau dengan kata lain mengurangi angka kemiskinan. Dalam hal ini, apakah penerima program harus orang yang miskin yang selama ini sebagai penganggur atau bekerja tetapi belum bekerja secara optimal atau masuk dalam kategori setengah penganggur?

Untuk menjadi seorang wirausaha, dibutuhkan karakteristik tertentu.

Apabila belum memenuhi karakteristik tersebut maka perlu dibina serta meyakini bahwa yang bersangkutan akan dapat memiliki karakteristik yang diperlukan untuk menjadi wirausaha yang handal. Dari persyaratan pendidikan dan umur yang berhak untuk mengikuti kegiatan program kewirausahaan di Kementerian Ketenagakerjaan, ternyata yang mencantumkan persyaratan pendidikan dan umur hanya untuk calon peserta TKM yang mencantumkan persyaratan pendidikan yaitu minimal SLTA. Sedangkan program lainnya seperti pelatihan kewirausahaan tidak mencantumkan persyaratan pendidikan.

Menurut Marshal, dalam Kodrat, David S. & Kristina Wina (2002), seorang interpreneur atau wirausaha adalah seorang pengusaha yang muncul melalui proses evolusi. Wirausaha adalah orang yang inovatif dalam hal merencanakan atau menemukan metode baru untuk menurunkan biaya sehingga dapat memproduksi secara efisien. Karena merupakan proses evolusi, maka untuk membentuk seorang wirausaha dibutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk membentuk *soft* kompetensi sebagaimana dituntut sebagaimana karakteristik wirausaha seperti kejujuran, mandiri, berani menghadapi risiko, mempunyai motivasi untuk maju yang tinggi, mempunyai cita-cita yang jelas dan terencana menghargai orang lain, dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Dengan demikian, dalam merekrut peserta program wirausaha di Kementerian Ketenagakerjaan sebaiknya diprioritaskan kepada seorang yang telah mempunyai *soft* kompetensi tersebut, minimal sudah memenuhi sebagian besar *soft* kompetensi tersebut. Untuk itu, dalam merekrut calon peserta program harus dilakukan secara lebih serius. Lebih baik lagi diutamakan kepada mereka yang telah memulai usaha atau yang sudah mempunyai usaha, minimal kehidupan sehari-hari berada di lingkungan pengusaha.

Salah satu cara adalah dengan merekrut lulusan perguruan tinggi atau SLTA yang semasa menjadi mahasiswa atau siswa telah mengikuti program kewirausahaan serta mendapatkan rekomendasi dari guru/dosennya. Cara lain dengan melakukan sosialisasi dan pengumuman, sehingga mereka yang mengikuti program adalah mereka yang betul-betul membutuhkan dan ingin menjadi wirausaha yang sukses. Dengan demikian diberikan kesempatan kepada semua masyarakat yang berkeinginan untuk mengikuti program kewirausahaan di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal ini yang terpenting adalah dalam melakukan tes rekrutmen dilakukan secara lebih baik, sehingga peserta yang terseleksi betul-betul orang yang berminat dan dinilai mampu untuk menjadi wirausaha yang handal. Sedangkan pendidikan diharapkan makin tinggi pendidikan lebih baik, begitu juga umur tenaga kerja yang makin muda lebih baik.

Oleh karena itu, syarat calon peserta diupayakan adalah mereka yang mempunyai karakteristik kewirausahaan atau mempunyai potensi untuk menjadi wirausaha, yaitu mempunyai karakteristik: percaya diri, mandiri, berani menghadapi resiko, mau melakukan pembaharuan/perubahan, jujur,

menghargai orang lain dan dapat berkomunikasi dengan baik. Oleh karena itu, persyaratan usulannya antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Umur;
- c. Pengalaman;
- d. Lingkungan keluarga atau orang terdekat yang berwirausaha/berwiraswasta.

Dengan demikian, persyaratan tersebut merupakan persyaratan pendukung sebagai bahan pertimbangan, yang lebih penting adalah sifat atau karakter dasar dari yang bersangkutan dapat dijamin akan menjadi wirausaha yang handal. Oleh karena itu, seleksi yang baik menjadi keharusan dalam penentuan peserta program kewirausahaan baik yang akan mengikuti pelatihan maupun program TKM atau program kewirausahaan lainnya. Keterkaitan dengan ketercapaian sasaran program kewirausahaan, yaitu mengentaskan kemiskinan dan memperluas kesempatan kerja. Apabila pengembangan wirausaha tersebut dapat berhasil maka sasaran tersebut dapat tercapai. Hal ini disebabkan apabila tercipta banyak wirausahawan, maka akan tercipta pula lapangan usaha yang terkait langsung dengan kegiatan wirausaha maupun kegiatan multipel efek lainnya. Pekerjaan yang terkait langsung antara lain adalah kegiatan yang menyediakan bahan baku, kegiatan dalam proses produksi dan tenaga pemasarannya. Di samping itu, juga akan tercipta kegiatan akibat dari multipel efek lainnya, seperti kegiatan di bidang transportasi dan angkutan. Secara tidak langsung dengan berkembangnya wirausaha tersebut, maka akan banyak yang mendapatkan pekerjaan dan mereka akan lebih sejahtera.

### 3.3.2. Evaluasi Proses

- a. Pembekalan, Pelatihan dan Pendampingan

Program pelatihan kewirausahaan diberikan kepada mereka yang sudah berusaha dan atau orang yang berminat atau mempunyai motivasi untuk menjadi wirausaha. Kepada mereka hanya diberi materi pelatihan di kelas dan kerja praktik di perusahaan yang ditunjuk.

Menurut para alumni yang mengikuti pelatihan, pelatihan tersebut bermanfaat bagi mereka. Namun setelah selesai pelatihan mereka dilepas dan diharapkan dapat berkembang dengan sendirinya. Dalam kenyataannya, dari 10 orang sampel yang dilatih, yang terdiri dari 7 orang telah mempunyai usaha dan 3 orang lainnya belum mempunyai usaha, ternyata setelah kurang lebih 2 tahunan sejak pelatihan, dari 3 orang yang belum mempunyai usaha hanya berkurang 1 orang. Dengan demikian yang 2 orang belum berusaha secara mandiri, walaupun mereka tetap bekerja di perusahaan pembuat kue. Alasan mereka belum berusaha sendiri karena tidak punya modal dan tempat untuk usaha.

Sementara dari 7 orang yang sebelumnya telah berusaha, kondisi sekarang

tidak banyak berbeda dengan kondisi sebelumnya. Permasalahan yang mereka utarakan antara lain karena keterbatasan pasar dan modal. Jenis usaha yang dikembangkan adalah 6 orang di bidang kuliner, satu orang fotokopi dan satu orang travel. Konsumen atau pelanggan dari usaha mereka masih terbatas di lingkungan pasar lokal, dan bukan merupakan kebutuhan primer seperti beras dan 9 barang pokok lainnya. Oleh karena itu kondisi ekonomi masyarakat sangat berpengaruh terhadap maju mundurnya usaha mereka.

Setelah selesai pelatihan diharapkan mereka dapat mengembangkan usaha mereka secara mandiri, mereka dilepas dan sama sekali tidak diberi pendampingan. Apabila mereka mengalami kesulitan tidak dapat berbuat banyak dan tidak tahu harus ke mana mengadu serta mendapat bimbingan selanjutnya. Sementara tugas dan fungsi Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD) adalah menyelenggarakan pelatihan produktivitas, melakukan pengukuran produktivitas dan memberikan pelayanan konsultasi (klinik) produktivitas. Dengan tugas tersebut seharusnya kepada alumni yang telah dilatih juga harus melakukan pendampingan dan melakukan pengukuran serta memberikan konsultasi kepada mereka yang melakukan usaha. Namun dalam kenyataan mereka hanya melakukan kegiatan pengukuran dan konsultasi pada usaha atau perusahaan lain.

b. Evaluasi Pemberian Bantuan Sarana Usaha

Berbeda dengan program pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh BPPD, program kewirausahaan melalui kegiatan pengembangan TKM akan memberikan peralatan yang dapat mendukung usaha peserta yang sudah diberi pelatihan serta pendampingan selama 11 bulan. Alat yang diberikan kepada peserta program TKM bermanfaat dan digunakan. Dengan alat yang diberikan yaitu alat penggorengan dan penggilingan kopi untuk pengusaha bubuk kopi dan alat pembautan mie dan bakso dapat mengurangi biaya dan waktu kerja mereka.

c. Evaluasi Monitoring

Dalam upaya menumbuhkembangkan kewirausahaan, setelah mereka mendapatkan pelatihan dan bantuan sesuai dengan kebutuhannya, pendampingan kepada alumni pelatihan merupakan kebutuhan yang mutlak, harus ada. Karena dengan pendampingan tersebut, maka perkembangan para alumni pelatihan dapat diketahui dan ketika menghadapi permasalahan dapat segera dicari solusinya.

Perkembangan kesehatan dan kemajuan usaha dapat diketahui berdasarkan parameter antara lain: (a) Kemahiran cara pembukuannya (kelengkapan dan kerutinitasnya); (b) perkembangan omset usaha; (c) perkembangan modal dan aset untuk usaha; (d) Perkembangan keuntungan; dan (e) Perkembangan jumlah karyawan atau orang yang terlibat dalam proses usahanya. Untuk itu, maka dituntut kompetensi TKS yang diberi tugas untuk mendampingi alumni. Oleh karena itu, kepada para TKS seharusnya sebelum

melakukan pendampingan juga diberi bekal yang lebih banyak dari bekal yang diberikan kepada TKM. Hal ini penting karena tugas mereka selain memberikan semangat dan jiwa optimis, mempunyai pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha, juga dapat melihat dan mengidentifikasi peluang usaha dan inovasi untuk kemajuan usaha para alumni. Bila memungkinkan diupayakan agar kemampuan/kompetensi TKS setara dengan instruktur di BPPD yang mempunyai tugas memberikan pelayanan konsultasi/klinik kepada perusahaan.

Selain pendampingan oleh TKS, kepada para alumni dalam waktu yang periodik misal 3 bulan sekali atau minimal 6 bulan sekali diberi kesempatan untuk berkumpul dan menyampaikan pengalaman serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing alumni dengan mendatangkan pengusaha yang berhasil di usahanya sejenis dengan bidang usaha para alumni.

Bagi TKS yang mendampingi Program TKM, apabila telah selesai kontrak selama 1 bulan, dan berminat untuk menjadi wirausaha, kepada mereka diberi kesempatan dan dibina untuk menjadi wirausaha dengan mendapatkan pelatihan dan bantuan dari kementerian. Kepada mereka juga perlu diberi semangat, dimonitor jiwa kewirausahaannya, pengetahuan dan kemampuan mengelola usaha, serta upaya yang dilakukan untuk menjadi wirausaha yang handal. Oleh karena itu, bila TKS yang melakukan pendampingan TKM atau alumni pelatihan kewirausahaan, sebaiknya tidak diberi beban tugas lainnya seperti pengelolaan Bursa Kerja Online.

Dalam perencanaan, penyusunan program, dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, selama ini masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Direktorat Produktivitas cq UPT BPPD melakukan pelatihan kewirausahaan, tetapi peserta tidak diberi bantuan peralatan usaha maupun modal usaha dan tidak diberikan pendampingan. Padahal salah satu tugas BPPD adalah melakukan layanan konsultasi atau klinik dan pengukuran produktivitas kepada perusahaan yang ada di provinsi bersangkutan. Sementara perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program TKM dilakukan oleh bidang penempatan tenaga kerja di daerah dan direktorat perluasan kesempatan kerja tanpa berkoordinasi dengan direktorat produktivitas di tingkat pusat, maupun BPPD di daerah. Sedangkan peserta program TKM mendapatkan pelatihan, bantuan peralatan dan pendampingan oleh tenaga TKS.

Seharusnya pada perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program antar dua direktorat tersebut dipadukan, sehingga dalam penentuan daerah prioritas, usaha dan rekrutmen calon peserta dapat dilakukan bersama, pelatihan dilakukan oleh BPPD sesuai dengan tupoksinya, namun dalam pelaksanaannya tetap berkoordinasi. Sedangkan dalam pendampingan dapat dilakukan TKS yang sudah dibekali oleh BPPD dan Bidang Penempatan. Integrasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh lembaga/institusi yang berada di lingkungan Ketenagakerjaan, tetapi sebaiknya diintegrasikan juga dengan lembaga lain seperti Kementerian Koperasi dan

UKM, Perindustrian, Perdagangan, Pendidikan, dan sektor lain yang terkait, baik di tingkat pusat maupun dan tingkat daerah. Di tingkat pusat dikoordinasi oleh Bappenas, dan di tingkat daerah dikoordinasi oleh Badan Perencanaan daerah setempat.

#### 4. Kesimpulan

Bonus demografi menciptakan kondisi di mana jumlah tenaga kerja produktif sangat melimpah. Kondisi ini dapat dijadikan peluang besar bagi Indonesia untuk membangun perekonomian negara dengan menciptakan kesempatan kerja sebesar-besarnya bagi penduduk usia produktif serta meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang mereka miliki. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dari Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dengan memfokuskan peluang, pelatihan, dan pembekalan bagi tenaga kerja terdidik.

Mekanisme pelaksanaan TKM dimulai dari tahap identifikasi potensi, sosialisasi program, rekrutmen dan seleksi calon sasaran, melakukan evaluasi dan menetapkan hasil seleksi, pembekalan kelompok sasaran, pembentukan kelompok, pendampingan, bantuan sarana usaha, monitoring evaluasi, hingga pelaporan. Kendati demikian, pada pengimplementasiannya terdapat beberapa hal yang luput dari perhatian. Pertama, belum ada metode atau pedoman penentuan prioritas daerah yang akan mendapatkan program kewirausahaan, sehingga tujuan dan sasaran program tidak dapat tercapai secara optimal. Kemudian, dalam melakukan rekrutmen calon peserta sudah ada acuan sebagai standar, namun dalam pelaksanaannya kurang ditaati, sehingga perlu disusun kriteria dan standar calon peserta program kewirausahaan tersebut dan wajib digunakan sebagai acuan. Begitu juga belum ada kriteria dan standar sistem dan mekanisme rekrutmennya. Seperti yang sudah dijelaskan, perlu dirumuskan dan disepakati adanya konsep dan pengukuran jumlah wirausaha secara nasional, sebagai acuan semua pemangku kepentingan, khususnya yang terlibat langsung dalam pembangunan kewirausahaan.

Selain itu, belum semua kegiatan pengembangan wirausaha diikuti dengan pendampingan, sementara program kewirausahaan yang telah dilengkapi dengan pendampingan masih belum optimal, baik dari segi kualitas pendamping, waktu pendampingan maupun mekanisme pendampingannya. Waktu pelaksanaan program kewirausahaan juga relatif pendek. Padahal, membentuk seorang menjadi wirausaha yang mapan memerlukan waktu panjang.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan seharusnya mampu mengintegrasikan program TKM dengan program kewirausahaan lain yang mereka buat. Saat ini, pelaksanaan masing-masing program masih bersifat parsial dan berjalan sendiri-sendiri. Padahal, keterbatasan masing-masing program sebetulnya dapat dipenuhi oleh program lainnya. Pemda (bappeda) sebagai unit yang berfungsi menyusun perencanaan di daerah tidak terlibat bahkan tidak mengetahui adanya program dan kegiatan

pengembangan kewirausahaan di daerahnya. Untuk itu, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara Kemnaker dengan pemda setempat.

### Daftar Pustaka

- Adioetomo & Samosir. (ed.). 2010. *Dasar-Dasar Demograf*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat dan Lembaga Demograf FEUI.
- Adioetomo, S.M. & Indrayanti, R. 2018. "Memasuki Dunia Kerja dan kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia", dalam *Memetik Bonus Demograf*". Jakarta. Penerbit Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. Keadaan Angkatan Kerja berbagai tahun.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045*. Jakarta: BPS, Bappenas, UNFPA
- \_\_\_\_\_. 2019. *Penghitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018: Kajian Lanjutan 2*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2021. *Pendapatan Nasional 2016-2020*. Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2020. *Statistik Penduduk Lanjut Usia, Tahun 2020*. Jakarta.
- Bloom DE, Canning D, dan Rosenberg L. 2011. *Demographic Change and Economic Growth in South Asia*. PGDA Working Paper No. 67.
- Imawan, R. 2002. "Peningkatan Daya Saing: Pendekatan Paradigmatik Politis". Vol.6, No. 1. h. 79-80.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. *Laporan Kinerja Tahun 2020*. Jakarta.
- Kementerian Ketenagakerjaan. 2020. *Rencana Strategis 2020-2024*. Jakarta
- Kualitas Tenaga Kerja RI Rendah". Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, diakses dari [http://www.kemenperin.go.id/artikel/8161/KualitasTenaga-16/05/2022,10:53 WIB](http://www.kemenperin.go.id/artikel/8161/KualitasTenaga-16/05/2022,10:53%20WIB)).
- Latif Adam. "Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas (*Promoting Indonesian Labor Competitiveness Through Its Productivity Improvement*)". *Jurnal Kependudukan Indonesia*. Vol. 11 No. 2 Desember 2016, pp. 72.
- Margahana, Helisia, dan Eko Triyanto. 2019. *Membangun Tradisi Entrepreneurship pada Masyarakat*. Edunomika Vol. 03 No. 02 (Agustus 2019).
- Suryana. 2008. *Kewirausahaan, Pedoman Praktis; Kiat dan Proses Menuju Sukses*, Cetakan Ke Empat, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Zimmerer Thomas W. Scarborough Norama M & Wilson Daeng, 2006. *Kewirausahaan dan Manajmen Usaha Kecil*, Edisi ke 5. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- <https://poorvucenter.yale.edu/CIPP>